

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak reformasi muncul, Indonesia mulai menghadirkan suatu sistem demokrasi dan pemerintahan yang baru. Perkembangan reformasi yang telah berjalan sampai saat ini belum bisa dibuktikan berhasil seutuhnya sesuai cita-cita reformasi sebelumnya. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di Indonesia membutuhkan waktu yang tidak singkat dan cara untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik hanya bisa dilaksanakan apabila terjalin keseimbangan antara tiga pilar yaitu sektor pemerintahan, sektor swasta, dan sektor masyarakat yang saling berkesinambungan dalam pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, sosial dan ekonomi.

Mardiasmo (2009:25) menyatakan bahwa *Good Governance* adalah suatu sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya didasarkan pada prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu. Suatu penyelenggaraan negara yang menerapkan *good governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut melandaskan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan. Penerapan *good government governance* tentunya mempunyai beberapa manfaat yang perlu di jalankan oleh pemerintahan di Indonesia seperti terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih kondusif, karena cara pelaksanaannya bersih, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

Banyak faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip *good government governance* pada pelaksanaannya di dalam pemerintahan daerah, yaitu budaya organisasi, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi dan

pengelolaan keuangan. Faktor pertama yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip *good government governance* adalah budaya organisasi, budaya organisasi adalah sebuah tatanan yang mempengaruhi akal karyawan dalam bertingkah laku, cara mewujudkan pekerjaan dan cara bekerja dengan karyawan lainnya. Budaya organisasi terbentuk dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal bisa dibangkitkan dari masing-masing individu yang ada di dalamnya, kemudian faktor eksternal yang ikut serta menetapkan karakteristik budaya organisasi adalah kondisi ekonomi, teknologi sosial politik, hukum, dan agama (Sudarmanto, 2009:166). Budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap tingkah laku para karyawan, maka dari itu bila budaya organisasi pada suatu organisasi atau instansi baik, jadi tidak mengherankan jika anggota organisasi adalah orang-orang yang baik dan berkualitas (Morita, 2013).

Selanjutnya faktor kedua yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip *good government governance* adalah sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern adalah proses yang terstruktur pada tindakan dan aktivitas yang dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan semua pegawai untuk memberikan keyakinan penuh atas telaksananya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern bisa membantu pemerintah untuk mengurangi terjadinya kelemahan, kesalahan dan resiko kecurangan. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang efektif maka tujuan organisasi bisa terwujud secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan dilakukan dengan andal, pengamanan aset dapat dilakukan dan mendorong ketaatan kepada peraturan (Mardiasmo, 2009: 208).

Selanjutnya faktor ketiga yang mesti ditingkatkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik wajib ditunjang dengan komitmen seseorang atas organisasinya. Komitmen adalah suatu kesesuaian dari bentuk keterikatan

seseorang akan suatu hal. Adanya suatu komitmen bisa mewujudkan suatu dorongan bagi seseorang untuk bekerja lebih baik. Dimana komitmen organisasi yang kuat dalam individu bisa menjadikan individu berusaha untuk memperoleh tujuan-tujuan dalam organisasi (Wiratno, 2013). Komitmen dapat terwujud apabila individu dalam organisasi melaksanakan hak dan kewajibannya sejalan dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi adalah hasil kerja seluruh anggota organisasi yang bersifat kolektif (Robbin&Timothy 2012). Oleh karena itu, semakin tinggi komitmen yang dimiliki maka semakin tinggi pula kualitas kinerja organisasi yang dicapai.

Dan faktor terakhir yang menaruh keberhasilan dari penerapan *good government governance* adalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah segala kegiatan yang termasuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan (Halim, 2006:30). Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan merupakan sumbangan yang besar dalam menciptakan *good government governance* sehingga inilah dampak strategisnya pada peran pengawasan dan juga peran setiap instansi/OPD bisa terlihat (Arso, 2012 dalam Ruspina, 2013). Apabila pengelolaan keuangan daerah sudah baik dalam tahapnya maka akan memiliki dampak langsung kepada keberhasilan otonomi daerah dan merupakan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *good government governance*. Maka dari itu pengelolaan keuangan wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat oleh masyarakat.

Dari hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandar Lampung tahun 2021 gagal mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dikarenakan terdapat permasalahan baik dalam

penyajian materi maupun dalam pos laporan keuangan. Hal ini disebabkan banyaknya pengalihan program kerja yang ada di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (Lampung.poskota.co.id, 2021). Berdasarkan hal tersebut, mengungkapkan bahwa masih terdapat kelemahan dan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Pada saat BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), maka bisa dikatakan bahwa laporan keuangan entitas tersebut telah disajikan secara wajar dan berkualitas (Gustina, 2021).

Penelitian ini replikasi dari penelitian (Jalius, 2017) yang meneliti apakah adanya pengaruh sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, dan komitmen organisasi terhadap penerapan *good government governance* (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kembali apakah adanya pengaruh sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, dan komitmen organisasi terhadap penerapan *good government governance* (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). Perbedaan penelitian ini dengan replikasi terletak pada variabel bebas yang mana dipenelitian sebelumnya hanya menggunakan variabel sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, dan komitmen organisasi, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel budaya organisasi, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, dan pengelolaan keuangan. Selain itu, pada penelitian sebelumnya pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) tidak ada. Akan tetapi pada penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis secara simultan (Uji F).

Good government governance merupakan suatu tatanan yang mengatur bagaimana suatu perusahaan atau organisasi dilaksanakan dan dikontrol atau sebagai tata kelola perusahaan atau organisasi. Cara ini mengatur secara jelas dan tegas hak dan kewajiban pihak-pihak yang terikat dalam organisasi. Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti akan meninjau apakah pemerintah sudah melaksanakan prinsip-prinsip *good government governance*. Berdasarkan hal-

hal yang telah dibahas di atas, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap *Good Government Governance* (Studi Pada OPD Di Kota Bandar Lampung)”.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memusatkan penelitian ini agar mempunyai ruang lingkup dan arah penelitian yang jelas, pembatasan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan sample di Organisasi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Penelitian ini hanya meneliti variabel pengaruh budaya organisasi, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi dan pengelolaan keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap *good government governance*?
2. Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap *good government governance*?
3. Apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap *good government governance*?
4. Apakah terdapat pengaruh pengelolaan keuangan terhadap *good government governance*?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh budaya organisasi terhadap *good government governance*.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern terhadap *good government governance*.

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap *good government governance*.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengelolaan keuangan terhadap *good government governance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu akuntansi sektor publik, dan menyangkut budaya organisasi, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, dan pengelolaan keuangan.
- b. Sebagai bahan acuan/referensi bagi penelitian sejenis atau yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam meminimalisir budaya organisasi, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, dan pengelolaan keuangan *terhadap good government governance*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi 5(lima) bab, yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, pembahasan hasil penelitian sebelumnya, perumusan hipotesis serta kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang berisi penjelasan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan, dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian orang lain, dan bahan-bahan lain yang dijadikan sebagai referensi dalam pembahasan penelitian.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bagian ini berisi data yang dapat mendukung atau memperjelas pembahasan atas uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat berbentuk tabel dan gambar.